

Alfasisromarakap¹
Ahman²
Sunaryo³
Achmad⁴
Husen⁵
I Made Astra⁶

HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA DI ERA OTONOMI KHUSUS PAPUA

Abstrak

Hambatan dan Tantangan Profil Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Biak-Numfor di Era Otonomi Khusus Papua merupakan salah satu kajian yang dilakukan di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh kunci yang mengetahui perkembangan pendidikan di kabupaten Biak-Numfor, seperti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak-Numfor, Ketua dan staf Bappeda Biak-Numfor, pengawas dan guru senior yang dipandang penulis memahami situasi dan perkembangan pendidikan di Kabupaten Biak-Numfor. Selain hasil wawancara, penulis juga melengkapi penelitian ini dengan merujuk data sekunder berupa publikasi dari badan pusat statistik setempat sebagai acuan tambahan menganalisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian ini lebih banyak dielaborasi dari informasi yang diperoleh dari para informan kunci yang diwawancarai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada potensi daerah berupa sumber alam dan sumber daya manusia di daerah Biak Numfor yang kurang dimaksimalkan dalam pengembangan bidang pendidikan di kabupaten ini sehingga menimbulkan kendala dalam pengelolaan bidang pendidikan. Seperti, kurangnya guru di berbagai jenjang pendidikan, kurangnya peningkatan kompetensi guru, rendahnya kesejahteraan guru, lemahnya pengawasan terhadap perkembangan pendidikan di setiap jenjang pendidikan, kurangnya dukungan masyarakat, terbatasnya dukungan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan fisik sekolah yang lebih banyak dari peserta didik, minimnya koordinasi antara pusat.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengembangan Pendidikan

Abstract

Barriers and Challenges Profile of Biak-Numfor District Education in the Era of Special Autonomy for Papua is one of the studies conducted in Biak Numfor District, Papua Province. The population and sample in this study are key figures who know the development of education in the Biak-Numfor district, such as the Head of the Biak-Numfor District Education Office, the chairman and staff of the Biak-Numfor Bappeda, supervisors and senior teachers whom the author sees as understanding the situation and developments in education. in Biak-Numfor District. In addition to the results of interviews, the author also completes this research by referring to secondary data in the form of publications from the local statistical center as an additional reference in analyzing the data. This study uses descriptive analysis method. This method was chosen because this research is more elaborated from the information obtained from key informants interviewed. The results of this study indicate that there is regional

^{1,2)} Universitas Negeri Jakarta

Alamat e-mail: araprom47@gmail.com, ahmansyah@gmail.com, achhusen59@gmail.com, imadeimadeastra@gmail.com

potential in the form of natural resources and human resources in the Biak Numfor area which is not maximized in the development of the education sector in this district so that create obstacles in the management of the field of education. For example, the lack of teachers at various levels of education, lack of teacher competency improvement, low teacher welfare, weak supervision of the development of education at every level of education, lack of community support, limited support for educational facilities and infrastructure, physical construction of schools that are more than students, lack of coordination between centres

Keywords: Policy, Educational Development

PENDAHULUAN

Membangun kualitas sumber daya manusia, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Seluruh aspek atau kebutuhan terkait (penopang) perlu dikerahkan. Pendidikan sebagai salah satu aspek penting manusia membutuhkan penanganan komprehensif dan terintegrasi. Aspek-aspek pendukung ini perlu diidentifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan bertolak pada potensi dan kondisi obyektif daerah.

Pendidikan merupakan faktor penentu kualitas sumber daya manusia. Semakin baik dan tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, semakin mudah seseorang mengikuti dan menyerap kemajuan teknologi, sekaligus berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, fasilitas serta tenaga pengajar yang memadai, tingkat pengawasan yang kontinyu dan peran serta masyarakat.

Pendidikan yang baik memerlukan perencanaan yang baik pula, yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Pendidikan di suatu wilayah dapat berkembang baik dan lancar karena perencanaan yang baik dan terintegrasi; ditopang oleh komponen lain yang berkaitan dan dapat terukur.

Data kependudukan, misalnya, tentang usia sekolah merupakan salah satu komponen penting untuk merencanakan jenis dan jenjang pendidikan. Demikian pula sarana dan prasarana pendukungnya. Dengan demikian pengembangan pendidikan harus searah dengan jumlah penduduk usia sekolah, potensi daerah, seperti kualitas hidup masyarakat berkaitan dengan ekonomi keluarga, transportasi dan komunikasi serta partisipasi masyarakat.

Data kependudukan yang baik dan valid merupakan prasyarat untuk membuat proyeksi ke depan guna merencanakan program yang tepat sasaran. Data jumlah anak usia sekolah, misalnya, digunakan untuk merencanakan pengembangan pendidikan, seperti gedung sekolah, perabotan, tenaga pengajar, media pendukung lain, seperti buku-buku teks. Dengan data anak usia sekolah, dapat diproyeksikan luasan bangunan, ruang kelas dan perabotan untuk kurun waktu tertentu, misalnya, 5 tahun atau 10 tahun ke depan.

Data Kependudukan yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan sangat bermanfaat untuk perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Hasil survei di Biak pada bulan Mei 2021, memberikan gambaran awal bahwa rasio jumlah guru dan jumlah gedung sekolah tidakimbang. Selama kurang lebih 21 tahun terakhir (2000-2021), pembangunan fisik berupa gedung sekolah terutama untuk pendidikan dasar lebih banyak dari jumlah guru dan sebarannya. Pembangunan gedung sekolah baru kebanyakan dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat secara sepihak tanpa didahului dengan pertimbangan sebaran lokasi permukiman penduduk dan angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni serta jangkauan anak usia sekolah (PAUD hingga SD).

Unsur penunjang lain, seperti pengawasan terhadap keadaan sekolah, ketersediaan guru, sarana dan prasarananya, proses belajar-mengajarnya, dukungan orang tua/masyarakat, belum maksimal difungsikan untuk mengendalikan layanan pendidikan dasar maupun menengah dan kejuruan di Kabupaten Biak Numfor.

Upaya perekrutan guru kontrak sebanyak 500-700 orang untuk ditempatkan di semua jenjang sekolah belum diakomodir oleh pemerintah daerah karena belum ada regulasi yang menetapkan besaran pembiayaannya. Meskipun keadaan ini sudah digumuli beberapa tahun sebelumnya dan sudah menjadi catatan penting bagi penentu kebijakan bidang pendidikan di Kabupaten Biak Numfor, namun belum terealisasi hingga akhir tahun 2019.

Gambaran umum perkembangan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor dalam interval 20 tahun yang sebelumnya, memerlukan kajian khusus. Bagaimana rencana strategis yang dapat dijadikan tolok ukur untuk pengembangan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor agar lebih lebih terarah dan terukur di masa-masa yang akan datang, mengacu kepada visi dan misi pembangunan di Biak Numfor, dapat tercapai.

Dunia pendidikan di salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang terletak di Teluk Saireri ini menyisakan sejumlah dilema dari sekian permasalahan yang saat ini tengah digumuli penentu kebijakan di Tanah Papua.

Hasil survei dan wawancara dengan praktisi dan pemerhati pendidikan di Kabupaten Biak Numfor pada Mei 2021 menunjukkan, ada banyak hal yang harus dibenahi di Kabupaten Biak Numfor. Sebut saja, akses, ketersediaan sarana dan prasarana, kurikulum, sarana pendukung, tata kelola, peran serta masyarakat, kebijakan pemerintah, peran pendidikan non-formal, merupakan sebagian dari masalah yang ditemui.

METODE

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kepustakaan, pendekatan dokumentasi yakni meneliti dokumen-dokumen dalam bentuk laporan, buku-buku dan mewawancarai informan-informan kunci yang dinilai memahami situasi Pendidikan di daerah penelitian. Teknik Analisa data yang digunakan yaitu Teknik analisis interaktif terdiri dari tiga Langkah yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data.

Penelitian Kebijakan Pengembangan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor, ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2010), merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap masalah sosial atau kemanusiaan. Lebih lanjut Creswell mengatakan proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisa data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema yang umum dan menaksir makna data.

Dalam penelitian Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Biak Numfor, teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk dapat menjangkau data di lapangan sesuai dengan masalah penelitian yang ingin dikaji, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 1) Studi pustaka. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder atau data pendukung, 2) Observasi. Teknik observasi dilakukan untuk menjangkau data berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama di lapangan, 3) Wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk melakukan wawancara per informan. Selain teknik pengumpulan data yang dikemukakan di atas, teknik lain yang dilakukan adalah melakukan perekaman.

Informasi diperoleh dari para informan yang dirasa mengetahui dan memahami dengan baik pengembangan pendidikan di Biak Numfor. Penulis menggunakan teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria yang telah disusun, yaitu di atas 25 tahun, terdiri dari staf dinas pendidikan dasar dan menengah, perwakilan rakyat di DPR, staf Bappeda Biak Numfor.

Kegiatan evaluasi kebijakan pengembangan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kantor Bappeda Tingkat II Kabupaten Biak Numfor juga beberapa pengajar yang telah lama bertugas sebagai guru di Kabupaten Biak Numfor juga anggota dewan perwakilan rakyat Biak Numfor yang mengetahui perkembangan/manajemen pendidikan di Kabupaten Biak Numfor berdasarkan klaster wilayah pengembangan pendidikan.

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Creswell, 2010:274). Analisis data dilakukan berdasarkan informasi, pengamatan dan hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperi halnya permasalahan pendidikan di kota/kabupaten lainnya, permasalahan pendidikan di kabupaten Biak Numfor diperhadapkan pada beberapa masalah, di antaranya masalah akses, Fisik dan Prasarana Pendidikan (Mutu Sarpras dan Mutu Guru), kurikulum,

sarana pendukung, tata Kelola pendidikan, peran pendidikan luar sekolah, partisipasi masyarakat, kesejahteraan guru, kebijakan pemerintah.

1. Akses

Masalah akses dalam layanan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor yang berkaitan dengan akses peserta didik ke SD. Akses ke sekolah berkaitan pula dengan usia sekolah (SD). Persoalan akses berkaitan dengan keterjangkauan anak ke sekolah. Bila lokasi permukiman penduduk terkonsentrasi dengan teratur, maka jarak antara rumah siswa dengan layanan pendidikan/sekolah mudah terjangkau.

Persoalan lainnya adalah pemekaran kampung dan distrik yang selalu variatif sehingga kurang mendukung kebutuhan pendidikan. Di Distrik Bondifuar, misalnya, ada satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah atas. Jika ada pemekaran kampung setelah ada sekolah dasar sudah sangat membantu distribusi keterjangkauan peserta didik.

2. Fisik dan Prasarana Pendidikan (Mutu Sarpras dan Mutu Guru)

Kendatipun ada bangunan sekolah di Kabupaten Biak Numfor dan sejumlah sarana pendukung lain, namun kekurangan tenaga pengajar masih dirasakan. Tenaga pengajar (termasuk guru, kepala sekolah dan tata usaha) jumlahnya belum memadai. Misalnya, di salah satu sekolah dasar terdapat 3 guru kelas yang 1 kepala sekolah untuk tiga mata pelajaran. Saat ini ada 168 sekolah dasar. Berarti, 8 x 168 sama dengan 1400 guru sekolah dasar. Bila ada 830 guru yang harus ditempatkan secara merata di 67 sekolah, maka setiap sekolah dasar harus memiliki 12 orang guru.

Untuk guru SD, 40 hingga 50% belum S1 dan 50% belum mengikuti sertifikasi. Sedangkan guru taman kanak-kanak, 50 persen secara kuantitas belum berpendidikan strata satu dan belum sertifikasi. Peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) mencakup Taman Kanak-Kanak sampai SD belum merata. Pelaksanaannya belum signifikan. Tenaga pendidik masih kurang di setiap sekolah dan belum ideal. Setiap sekolah rata-rata hanya 2 hingga 3 orang guru yang berstatus pegawai negeri sipil. Tenaga guru lainnya masih berstatus sebagai tenaga honorer.

Untuk mengatasinya pemerintah menempuh langkah untuk mengontrak tenaga guru sehingga tahun 2019 ada 500 guru yang direkrut dan tersebar di semua jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA). Ini untuk mengisi kekosongan yang ada di semua jenjang sekolah. Sekolah yang kurang tenaga guru diisi oleh guru kontrak.

Tenaga guru yang dikontrak sudah diakomodir pembiayaannya melalui dana Otsus tahun 2020. Mereka disebarkan di setiap distrik. Peluang yang diharapkan adalah dapat membuka diri untuk mengetahui kesulitan guru-guru garis depan untuk dapat membantu kekurangan guru, disamping program sertifikasi guru yang sudah dijalankan melalui pendidikan dan pelatihan pada April 2004 dan Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang perekrutan guru kepala sekolah dan pengawas.

Guru berpendidikan strata satu di Biak sangat kurang terutama untuk mata pelajaran geografi, PKN, Sejarah, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Karena itu, diperlukan kerja sama kelas jauh dengan Pemerintah Daerah Biak Numfor untuk membuka jurusan-jurusan seperti ini. Perlu ada kelas khusus untuk orang asli Papua asal Biak khususnya untuk mata pelajaran tersebut di Biak.

Dalam hal peningkatan kualitas pendidikan untuk tingkat sekolah dasar, sudah ada langkah-langkah yang diupayakan yaitu program baca tulis (literasi). Jika di kelas awal/kelas rendah (kelas 1-3) tidak bisa baca-tulis, diharapkan ketersediaan guru mata pelajaran harus ada di tempat.

Kimshanov & Dyikanbaeva, dalam Eka Prihatin Disas, (2015), mengemukakan bahwa guru memiliki klasifikasi, kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi. Guru memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Pada bagian yang lain disebutkan bahwa dalam upaya mewujudkan Guru Profesional, ada beberapa poin yang diperhatikan, antara lain: 1) Konsistensi kepada standarisasi profesi guru sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan segala konsekuensinya; 2) mewujudkan pembinaan profesi guru sebagai siklus yang berkesinambungan dan saling mendukung (mulai dari prajabatan, proses rekrutmen dan

pembinaan guru dalam jabatan); melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan guru sesuai dengan karakteristiknya dan mewujudkan sinergi peran dan tanggungjawab antara guru, pemerintah, LPTK dan organisasi profesi.

Beberapa kasus sekolah bermasalah di Biak Numfor seperti SD YPK Hewel Mandori di Numfor, Timur misalnya. Di sini, terdapat 6 guru yang terdiri dari 3 orang PNS dan 3 guru honorer. Tiga guru PNS, dua di antaranya adalah pasangan suami-isteri. Guru laki-laki adalah kepala sekolah dan istrinya adalah guru biasa. Idealnya, 1 sekolah mempunyai 6 guru. Dengan demikian, satu guru mengampu satu mata pelajaran di setiap kelas (kelas 1 hingga 6).

Kasus tersebut (yang sempat dibicarakan di media social) telah menggugah pengambil kebijakan di Kabupaten Biak Numfor untuk mencoba mengubah model distribusi dan penempatan guru-guru di Kabupaten Biak Numfor.

Maka diharapkan ada perhatian khusus terhadap penempatan guru-guru di Kabupaten Biak Numfor. Setiap guru SD, SMP atau sejenisnya yang berasal dari daerah kepulauan Padaido harus kembali mengajar di daerah asalnya. Begitu pula untuk guru-guru yang berasal dari Pulau Numfor harus kembali mengajar di Pulau Numfor. Demikian pula untuk sekolah lainnya.

Verry, Y. Lounda, mengemukakan bahwa dari sepuluh kebijakan Pendidikan yang diterapkan di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang ditetapkan ada tiga kebijakan yang terlaksana yaitu: memperluas akses bagi anak usia 0-6 tahun baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi melalui PAUD, TK, mengurangi beban biaya Pendidikan bagi siswa keluarga miskin untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun, membentuk SD-SMP satu atap di daerah terpencil. Ketiga program kebijakan inipun belum sepenuhnya terlaksana oleh karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Kasus lain, misalnya, tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pemberlakuan kurikulum 2013 jadi kendala di lapangan karena kekurangan guru di lapangan. Di tiap sekolah guru kurang. Dari pemantauan di lapangan di Kepulauan (Distrik) Aimando, misalnya, ada fakta tentang kekuarangan guru. Tidak jarang kepala sekolah harus berupaya keras merekrut guru-guru untuk mengajar di sekolahnya karena masalah ini. Meskipun upaya yang dilakukan tidak selalu terpenuhi, namun proses belajar-mengajar diupayakan tetap berlangsung.

Secara umum, guru sekolah dasar hingga sekolah menengah atas/kejuruan di Biak- Numfor selalu kurang. Sudah ada rencana pemerintah untuk mengontrak guru di tahun 2018 sebanyak 700-an guru kontrak, namun belum ada realisasi maksimal karena terkendala dana. Meskipun demikian, proses belajar-mengajar diupayakan tetap berlangsung di tengah kondisi kekurangan yang ada.

Eka Pirhantin Disas, mengemukakan bahwa dilihat dari kondisi pendidikan Indonesia saat ini, guru masih belum secara profesional melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho melihat proses pendidikan sebagai pengembangan kepribadian mencakup upaya yang sangat luas, terdapat banyak teori mengenai kepribadian, strukturnya, pengembangannya, serta tujuannya.

Idealnya harus ada 18-20 hingga pengawas di tingkat sekolah dasar. Kenyataannya saat ini hanya ada 2 pengawas. Hal ini menyulitkan pemantauan di lapangan. Kendalanya: tidak tersedia dana operasional bagi pengawas sekolah. Ini salah satu penyebab timbulnya masalah di sekolah tertentu.

SD YPK Hewel Mandori, misalnya, mempunyai 134 siswa. Karena kekurangan guru, jika guru yang ada bepergian ke Kota Biak untuk mengurus kebutuhan hidup, jam pelajaran sekolah bisa macet beberapa hari. Hal ini tentu menimbulkan keprihatinan di kalangan orang tua murid.

Jadi, inti persoalan pendidikan di Biak, salah satunya, kelangkaan guru di setiap jenjang pendidikan. Pembelajaran Tematik Terpadu tidak dipahami secara baik sehingga pelaksanaannya kurang jalan dan CALISTUNG diharuskan untuk diutamakan dan harus dikuasai guru.

3. Kurikulum

Guru-guru di Biak umumnya masih menggunakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (K-13). Diharapkan guru menggunakan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan

kebutuhan pembelajaran dan harus ditingkatkan karena tidak semua guru mengikuti dan menggunakan kurikulum K-13. Proses pengajaran, termasuk kemampuan guru dalam memberikan evaluasi terhadap hasil belajar siswa harus memenuhi standar yang diinginkan karena guru SD hingga SMA/SMK diharapkan seluruhnya berkualifikasi strata satu (S1) dan bersertifikasi.

Lasmawan dalam Suyahman, (2016), mengemukakan bahwa kurikulum sebagai salah satu bentuk operasional kebijakan, pada dasarnya telah memuat sejumlah rumusan dan wacana yang sangat demokratis bagi kalangan pelaku di daerah, namun sayang mereka tidak mampu menterjemahkan makna dan jiwa dari kurikulum itu dengan baik.

4. Sarana Pendukung

Sarana pendukung pendidikan di Biak Numfor, baik pendidikan dasar, menengah pertama, umum dan kejuruan pada umumnya sama seperti sarana pendukung pada sekolah di kabupaten lainnya yaitu ketersediaan media pembelajaran dan alat pendukung lainnya yang dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Umi Arifah, (2018:31) mengemukakan bahwa anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi Pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran Pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan Pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pendanaan belanja Pendidikan bagi anak didik berasal dari beberapa pihak, yaitu pemerintah, Yayasan, orang tua dan pihak lainnya. Sementara itu dana pendidikan dari pemerintah berasal dari tiga sumber yang dipergunakan untuk membiayai Pendidikan anak didik yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Anggaran belanja Pendidikan yang didapat dari Kemendiknas merupakan sumber dana dari Pemerintah Pusat, sementara yang dana dari daerah didapat dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Anggaran di sector Pendidikan di masing-masing daerah dipergunakan untuk membiayai dana pendidikan bagi siswa bagi siswa yang ada di tingkat SD, SMP, SMA/SMK sehingga mendapatkan manfaat Pendidikan.

Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya rumah guru, rendahnya disiplin siswa dan guru. Disiplin siswa dan guru sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2013. Fakta lain yang muncul terkait pembangunan pendidikan di Biak saat ini adalah munculnya kecemburuan sosial antarguru, karena di kelas paralel di sekolah-sekolah tertentu butuh guru banyak di setiap mata pelajaran sedangkan sekolah yang tidak punya kelas paralel gurunya sedikit. Hal ini nampak di daerah-daerah yang masuk kategori daerah terpencil seperti kepulauan Padaido dan Numfor.

Untuk memacu peningkatan kualitas dan kualifikasi pendidikan di daerah-daerah seperti ini (kepulauan), perlu ada penambahan guru sesuai kebutuhan mata pelajaran.

“Ibarat perahu motor tempel yang semula menggunakan 15 PK, mulai sekarang harus diganti dengan 25 PK supaya menambah daya kebut”.

Pernyataan tersebut menggugah warga Biak pada umumnya untuk membangun pendidikan di Kabupaten Biak Numfor dengan meminjam mata raja wali yang selalu menerawang segala penjuru ketika melintas di udara.

Artinya, perlu pengkajian segala aspek harus dikaji, dari tingkat kampung tingkat distrik, hingga kabupaten. Tidak sekadar menilai dan meninjau satu aspek semata.

Peningkatan kompetensi guru perlu ditingkatkan sebagai bagian inheren yang dari tuntutan profesi untuk menyiapkan masa depan peserta didik yang mumpuni. Yang tak kalah penting, pendidikan kejuruan untuk jurusan-jurusan yang sesuai dengan tuntutan kerja kontemporer (saat ini) perlu pula dipersiapkan. Sebut saja, misalnya, pertukangan, perbengkelan dan industri lainnya yang potensiil menciptakan lapangan kerja sendiri dan/atau membuka lowongan kerja di luar sektor pemerintah.

Dengan begitu, kebijakan di dunia pendidikan di Kabupaten Biak-Numfor tidak melulu difokuskan pada sektor pendidikan formal saja. Pendidikan ketrampilan dan yang sempat diterapkan di Papua di era Belanda, bisa dirujuk atau dipertimbangkan.

Tentu pendidikan tinggi perlu, tetapi tidak semua peserta didik akan terserap ke sana. Kita tidak ingin menciptakan elite pengangguran dengan pendidikan tinggi yang akan menimbulkan

persoalan dan kerawanan sosial. Pendidikan ketrampilan berbasis kewirausahaan yang sesuai dengan potensi lokal layak pula dipertimbangkan. Sebutlah potensi laut yang dapat dimanfaatkan dengan cara-cara yang lestari dan berkelanjutan.

Jauh-jauh hari sudah ada pemikiran dari kalangan akademisi untuk membedah IPM Biak Numfor sehingga ada kesesuaian antara jumlah penduduk, luas wilayah dan ketersediaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, yang salah satu sumbernya diperuntukkan untuk pembangunan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.

5. Tata Kelola Pendidikan

Tata kelola berkaitan dengan manajemen pendidikan yang dilakukan dinas pendidikan sebagai pelaksana pendidikan di lapangan. Tata kelola pendidikan di Kabupaten Biak Numfor, harus ditingkatkan karena untuk jenjang pendidikan dasar SD belum dilakukan tahapan yang benar melalui seleksi, diklat dan magang.

Penyelenggaraan sesuai administrasi yang baik terkait akreditasi sebagai parameter untuk mendukung akuntabilitas dalam rangka melakukan pemetaan pendidikan secara daring (*online*). Pemetaan dimaksud sudah dilakukan tapi belum di semua jenjang pendidikan.

Tujuh puluh 70% sekolah-sekolah di Biak, baik SD dan SMP adalah sekolah berstatus Yayasan Pendidikan Kristen (YPK). Kebijakan nasional dalam penempatan guru pendistribusian guru di Biak selalu gugur karena status guru yang di Yayasan Pendidikan Kristen ketika melaksanakan Permendiknas No. 6 Tahun 2018 tentang kepala sekolah dan Permendiknas No. 15 tahun 2018 tentang jam kerja, selalu jadi masalah karena aturan tidak didistribusikan.

Permasalahan lainnya adalah banyak sekolah tidak dilengkapi dokumen regulasi, dalam hal isi, lulusan, penilaian, pengelolaan, sarana dan prasarana. Hal-hal ini tidak dimiliki sekolah, padahal dokumen-dokumen tersebut sangat penting untuk menilai kualitas pendidikan dan menjadi ukuran DAPODIK

Elih Yuliah, (2020), mengemukakan bahwa kegagalan kebijakan pendidikan disebabkan oleh suatu kebijakan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pada akhirnya berakibat pada implementasi yang tidak efektif dan sulit dipenuhi, implementasi yang tidak berhasil karena pelaksanaan buruk. Disamping kekurangan informasi sehingga menyebabkan gambaran yang kurang jelas ini berdampak buruk kepada objek kebijakan maupun kepada pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil kebijakan itu.

Saat ini diharapkan guru-guru sekolah dasar di Biak Numfor adalah lulusan strata satu (S-1). Di kabupaten ini rasio guru mata pelajaran agama lebih banyak dibanding guru-guru mata pelajaran lain. Di sebuah sekolah dasar, tidak jarang bisa ditemui hingga 4 guru agama. Idealnya, cukup satu guru agama. Guru-guru agama di sekolah yang sama bisa didistribusikan ke sekolah-sekolah untuk menghindari penumpukan.

Ke depan perlu kerja sama dengan perguruan tinggi terkait kebutuhan guru, terutama guru SD, SMP, dan SMA/SMK. Program studi tertentu di FKIP Uncen seperti geografi, sejarah, PKn, bahasa Indonesia bisa dibuka di Biak dan status mahasiswa yang kuliah di Biak sama seperti yang kuliah di FKIP Uncen sehingga kurang lebih 5 hingga 10 tahun ke depan begitu selesai kuliah di Biak, dapat mengisi kekosongan guru yang ada.

Gedung Petrus Kafiari Biak yang berlokasi di Ridge II yang bangunan serta ruang-ruangnya bisa direnovasi untuk dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang kuliah bagi kelas-kelas jauh yang dibuka oleh Pemda Biak bekerja sama dengan Uncen. Peran Pengurus Sekolah Wilayah (PSW) YPK Biak perlu melirik peluang ini.

Jurnal Neraca: Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi, (2017), memberitakan bahwa kalau dikaji arah dan tujuan inovasi yang kita perlukan adalah dalam hal berikut: 1) Inovasi Proses Pembelajaran Di Sekolah, 2) Inovasi Sarana Pembelajaran di sekolah, 3) Inovasi Pengelolaan Sekolah, 4) Inovasi Supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah, 5) Evaluasi kebijakan Pendidikan, 6) Inovasi Sistem Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor berperan penting menunjang pelaksanaan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Partisipasi dapat berwujud peran orang

tua, masyarakat hingga pembentukan komite sekolah lewat program yang dilakukan. Ia bermanfaat mendukung visi dan misi sekolah. Tanpa itu, peningkatan pendidikan yang baik yang diharapkan saat ini tidak akan bergerak ke mana-mana, seperti yang dirasakan di kabupaten ini.

Kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi bersama akan manfaat pendidikan bagi peserta didik terasa masih minim. Ini yang perlu disadari dan menjadi perhatian bersama. Perkembangan sekolah tidak akan bergerak maju, jika masyarakat melepaskan tanggung jawab hanya pada pemerintah daerah. Tata kelola tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika tidak didukung partisipasi masyarakat.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat menganggap pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka sebagai urusan sepenuhnya pihak sekolah dan dinas pendidikan. Walaupun ada sejumlah kasus, tampak ada perhatian dan dukungan dari orang tua peserta didik. Sebutlah dalam hal pembangunan rumah guru. Kampung Sowek di Distrik Aruri, Kabupaten Supiori Selatan, misalnya. Enam belas rumah guru di kampung ini dibangun oleh warga setempat (orang tua murid). Setiap kelompok marga/keret membangun satu buah rumah guru.

Ivan Hanafi, dkk (2015), mengemukakan bahwa komite sekolah berperan dalam mengontrol penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah, peran komite sekolah sebagai sistem, komite sekolah sebagai pendukung dalam hal finansial, pemikiran ataupun tenaga yang dapat disumbangkan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah, peran sebagai pengawas penyelenggaraan sekolah, peran sekolah sebagai penghubung.

Pada saat-saat lampau, guru-guru di kampung-kampung bisa dikontribusi dengan bahan makanan, air bersih dan kayu bakar. Dua yang disebut terakhir biasa menjadi tanggung jawab peserta didik. Sekarang kebiasaan itu sudah menghilang. Guru-guru harus memenuhi kebutuhan sendiri dengan membelinya dari warga kampung.

Untuk memanimalisir situasi yang ada, UNICEF telah menyelenggarakan beberapa program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum distrik dengan melibatkan kepala sekolah, kepala distrik dan kepala kampung. Hal ini penting karena dukungan orang tua terhadap pendidikan, kalau pun ada, sudah banyak bergeser. Ketika Papua masuk ke dalam NKRI peserta didik terkesan banyak dimanjakan oleh regulasi pemerintah. Ketika anak-anak dilecut dengan rotan, misalnya, orang tua mendatangi sekolah, memarahi guru atau mungkin mengadukannya ke polisi.

Sekarang orang tua jarang mendukung anak dalam hal belajar di rumah terutama di daerah-daerah perkampungan. Hal yang mungkin berbeda dengan daerah-daerah di daerah perkotaan. Di sekolah-sekolah di daerah perkotaan, ada dukungan dari pihak sekolah dan komite sekolah. Sekolah-sekolah yang belum terakreditasi masih menunggu hasil akreditasi dan visitasi.

Sekolah-sekolah di Biak yang terdaftar sudah menunggu aplikasi sejak 15 Juli-2 Januari 2019 untuk akreditasi. Ketersediaan teknologi sudah memadai, hanya saja terasa tidak menopang pengembangan pengetahuan peserta didik.

7. Peran Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah adalah salah satu layanan pendidikan yang berperan mendukung program pendidikan formal. Fungsinya, memperbaharui proses pendidikan formal yang tidak berjalan secara penuh. Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten Biak Numfor dibentuk berdasarkan Permendikti yang diganti pada 1985/1986 dengan nama MASORDA (Masyarakat Olahraga Daerah). Ada anak-anak sekolah di daerah Biak Numfor yang mengikuti pendidikan non-formal (PNF). Pada 1987/1989 MASORDA diganti menjadi Pendidikan Masyarakat. Kemudian pada tahun 2000 diganti menjadi Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Pendidikan non-formal kembali dibuka, kemudian pendidikan luar sekolah menjadi pendidikan non-formal dan informal.

Pendidikan Luar Sekolah mencakup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak. Berdasarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2000 disebut PLS karena nomenklatur bergabung dari PLS dan bidang PO (Pemuda dan Olahraga). Satuan Pendidikan dalam PLS adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Sejenis, Tempat Penitipan Anak. Sasarannya adalah anak-anak usia 0-6 tahun. Setelah memasuki umur 7-12 tahun Permen No 10 Tahun 2010 melalui Dirjen PAUD dan Dikmas Kemenristek masing-masing jalan sendiri

tapi tetap di bawah payung pendidikan. Taman Kanak-kanak adalah awal pendidikan dasar. PAUD terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Sejenis dan Tempat Penitipan Anak. Dalam pelaksanaannya di lapangan PAUD adalah kelompok Pancasila.

Program PLS yang lain adalah Program Kesetaraan Paket yang terdiri dari Paket A: SD sederajat, Paket B: SMP sederajat, Paket C: SMA sederajat. Ada juga program untuk penduduk 35-55 tahun yang disebut KF (Keaksaraan Fungsional) dan PBH (Pemberantasan Buta Huruf yang menyasar masyarakat yang tidak sekolah yang disebut CALISTUNG. Tidak tamat SD tapi umur produktif bisa masuk paket B. Yang tidak lulus SMP bisa masuk paket B. Yang ikut program paket C adalah yang tidak lulus SMA. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan wadah untuk paket A, B, C, Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD sejenis, Tempat Penitipan Anak, Keaksaraan Fungsional, Pemberantasan Buta Huruf. PKBM tidak punya bangunan yang khusus yang harus ditunjang oleh guru. Diperlukan kerja keras untuk mencari rombongan belajar ke rumah-rumah warga terutama warga yang tidak bisa baca-tulis. Bila ada diusulkan menjadi warga binaan PKBM.

Pada umumnya masyarakat mendukung PKBM karena memudahkan pembelajaran. Pada tahun 2013 PKBM di Biak diusulkan untuk mendapat dukungan presiden tahun 2013-2019, yang untuknya di tiap kampung wajib ada 1 PKBM dan 1 PAUD. Namun demikian di setiap distrik PKBM dan PAUD mengalami kendala tempat kegiatan PKBM. Subdin PLS berharap masyarakat memberikan data tentang warganya yang akan mengikuti paket A, B, C. Kebutuhan kelompok belajar yang diharapkan agar tidak menyita waktu untuk mencari rombongan belajar di tempat tinggalnya. Selain PKBM, PAUD di tiap kampung adalah usia 0-6. Usia tersebut dianggap sebagai usia emas untuk membentuk karakternya.

Ada pemikiran untuk ke depan siswa PLS dapat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer. Siswa yang mengikuti program paket A, B, C harus diatur dan wajib diikuti. Setelah ada kendala-kendala harus ada prioritas. Secara umum dinas pendidikan khususnya PLS se-Papua belum siap. Diharapkan sarana dan prasarana tersedia. Perlu ada gedung untuk PKBM, supaya ada fasilitas, seperti komputer dan pengajar. Sarana dan prasarana tersebut harus ada supaya UNBK bisa dijalankan. Ketiadaan sarana dan prasarana memunculkan kesan ketidakadilan, karena PLS Biak sering meminjam laboratorium dan fasilitas lain yang cukup lengkap di sejumlah sekolah sebagai tempat tes UNBK. Hal ini penting mengingat PKBM yang tidak mempunyai gedung PKBM, laboratorium dan pengajar sehingga otomatis UNBK tidak bisa dilaksanakan. Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten Biak-Numfor belum menjadi skala prioritas. Jaringan juga harus ada supaya aksesnya jalan.

Sistem ujian yang sudah diikuti adalah UNKP: Ujian Nasional Komputer Berbasis Pensil (mengisi formulir dengan pensil). Selama ini pakai UNKP. Siswa PLS yang sudah bisa menggunakan UNKP adalah di Biak Barat Jauh dan Numfor. Distrik Aimando (Padaido) belum normal dalam pemanfaatan jaringan UNKP-nya, sehingga bergabung dengan siswa PLS lainnya di Biak Timur. PKBM Oridek di daerah Biak Timur menggunakan gedung SMK Bosnik karena ketersediaan laboratorium dan teknisinya.

8. Kesejahteraan Guru

Persoalan lain di Kabupaten Numfor adalah, tidak betahnya guru di tempat tugas. Guru di beberapa tempat tugasnya di Biak dianggap tidak setia pada profesi, karena baru bertugas 1 tahun, di tempat tugas yang ditetapkan dinas pendidikan Biak-Numfor, memilih hengkang ke Biak Kota, karena alasan ekonomi, masalah transportasi. Kinerja guru menurun karena faktor ekonomi. Rata-rata gaji guru terpotong untuk kredit bank sehingga mempengaruhi kinerja mereka. Tampak yang cukup tekun mengunjungi sekolah adalah guru honorer. Motivasi kerja guru kurang nampak sehingga mengurangi tugas utama. Ada guru yang merangkap menjadi tukang ojek. Malam melakukan aktivitas sebagai pengojek, pulang cukup larut, bangun kesiangan sehingga. Stamina juga menurun karena beban kerja yang rangkap.

9. Kebijakan Pemerintah

Kata kebijakan menurut Hasbullah, (2015) dalam Widya Sari, dkk (2019), mengemukakan bahwa kebijakan adalah terjemahan dari kata "policy" dalam Bahasa Inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, sehingga penekanannya bertujuh kepada Tindakan

(produk). Kata kebijakan jika disandingkan dengan Pendidikan maka merupakan hasil terjemahan dari kata educational policy yang berasal dari 2 kata, sehingga Hasbullah mengatakan kebijakan Pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang Pendidikan. Jika dilihat lagi maka kebijakan Pendidikan ini adalah hasil produk dari orang atau satuan yang terpilih, produk dari beberapa masukan dari semua pihak demi perbaikan mutu Pendidikan. Pada bagian yang lain Tilaar dan Nugroho, 2016, mengemukakan bahwa kebijakan berasal murni dari pertimbangan akan manusia, sekalipun demikian tentu manusia yang lebih dominan dalam pemilihan opsi-opsi kebijakan, karena dalam pemutuserannya terdapat penekanan kebijaksanaan dari faktor emosional dan irasional, bukan berarti kebijakan tidak rasional akan tetapi mungkin saja pada saat itu rasional belum tercapai atau merupakan intuisi. Implementasi kebijakan Pendidikan dilakukan melalui cara menganalisis situasi yang terjadi, membuat beberapa pilihan kebijakan, mengevaluasi pilihan kebijakan, merencanakan penerapan kebijakan, menilai dampak kebijakan, menentukan siklus kebijakan selanjutnya.

Upaya pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjawab pengembangan pendidikan di kabupaten ini dana otonomi khusus sebesar 80 persen untuk bidang pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan diperhitungkan berdasarkan disparitas daerah karena berpengaruh terhadap kecukupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini penting mengingat perkembangan pendidikan masih tertinggal. Tingkat pendidikan masih normatif. Eselon dua di Biak selalu ditunjuk pimpinan tertinggi. Bukan dilelang. Kepala sekolah pun diharapkan melaksanakan tugas mengajar di tengah kelangkaan guru.

Permasalahan lainnya: tugas pengawasan yang di sekolah-sekolah dasar yang belum memadai. Seharusnya pengawas di sekolah dasar 18-20 orang. Keadaan ini belum berubah. Di sebanyak 22 Sekolah Dasar pengawas memang melakukan tugas pengawasan untuk mengetahui perkembangan belajar siswa dan mengajar guru-gurunya, namun masa kunjungannya tidak teratur. Kendala ada di kekurangan tenaga pengawas yang hanya berjumlah dua orang (satu laki-laki, satu perempuan).

Tingkat kebutuhan guru SD harus dianalisis. Kebutuhan guru harus dianalisis dan dibuat menjadi kebijakan. Seperti pemaparan sebelumnya bahwa program 500 hingga 700 guru tidak direalisasi pemerintah daerah, padahal banyak sekolah kekurangan guru.

Minimnya pengawas sekolah di sekolah-sekolah dasar menyebabkan berbagai keluhan masyarakat, yang tidak dapat disaring kebenarannya atau diselesaikan di tingkat pengawas, langsung disampaikan ke kepala dinas atau pimpinan daerah lainnya.

Kasus guru di Kampung Mandori yang mangkir dari tugas berbulan-bulan dan persoalan interes dengan masyarakat sekitarnya. Karena alasan diberhentikan dari anggota majelis sehingga guru memilih hengkang dari tugas.

Pada sekolah lainnya di daerah terpencil, seperti di Numfor dan Padaido, ada guru-guru yang saling berkonflik karena persoalan tunjangan terpencil. Konflik terlecut lantaran ada guru yang menerima dan ada yang tidak. Menurut basis data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guru-guru di daerah terpencil belum terpetakan secara keseluruhan. Ada guru yang terekam data profilnya dan ada yang tidak. Ketidacocokan data guru inilah yang kemudian berpengaruh terhadap pemenuhan hak tunjangan daerah terpencil. Seperti rencana selanjutnya, bahwa tahun 2020 penataan administrasi guru akan diseragamkan melalui DAPODIK.

Selama ini guru yang ditempatkan sebagai kepala sekolah di Biak, melakukan tugas tambahan sebagai pengawas. Karena ada tugas ganda sehingga kinerja sebagai pengawas menurun karena harus mengutamakan tugas sebagai kepala sekolah dibanding melakukan pengawasan di sekolah-sekolah. Dilema inilah yang menyebabkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Biak-Numfor menjadi tidak merata dan terkesan jalan di tempat. Keluhan-keluhan guru, kepala sekolah dan masyarakat terkait pemenuhan layanan pendidikan yang seharusnya tersalurkan secara baik menjadi lemah. Akibatnya tata kelola dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di daerahnya belum menjawab kebutuhan pendidikan yang diharapkan.

Pengalaman beberapa tahun sebelumnya, seperti pada 2014, biaya operasional seorang pengawas di tingkat sekolah dasar sekali turun lapangan lapangan Rp 75.000, untuk sekolah-sekolah yang hanya dijangkau dengan kendaraan roda dua. Pengawasan sekolah-sekolah di Kepulauan Padaido bagian atas, tengah dan bawah, termasuk pengawasan pelaksanaan

pendidikan di Pulau Numfor (Numfor Barat dan Numfor Timur) macet karena tidak tersedia dana transportasi/dana operasional.

Enam tahun kemudian (2019) dana operasional pengawas sekolah dinaikkan menjadi Rp 150.000 untuk satu kali melakukan perjalanan pengawasan. Namun hanya untuk sekolah-sekolah yang bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua. Meskipun dengan kondisi demikian, tugas pengawasan diupayakan tetap berjalan. Di kepulauan Padaido dan Numfor tugas pengawasan seret karena keterbatasan dana transportasi. Termasuk pengawasan ke distrik Biak Barat (dekat dan jauh).

Pengawas sekolah dituntut untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut: bertemu guru, kepala sekolah, siswa dan masyarakat. Tidak hanya mendengar laporan dari satu pihak/sumber saja. Setumpuk masalah dari waktu ke waktu terus berdatangan tanpa penyelesaiannya. Hingga muncul kebijakan yang baru dengan gayanya yang baru pula.

Sangat disayangkan slogan angka Indeks Pembangunan Manusia Biak Numfor yang masuk kategori terpenuhi di atas kertas, tapi tidak berdampak apa-apa atas pendidikan di kabupaten ini. Dana Otsus yang ditetapkan 80 persen untuk bidang pendidikan dan kesehatan, seolah-olah tidak menampakkan hasil. *“Ibarat pohon, hanya daun dan cabangnya saja yang tampak hijau-segar, sementara akarnya sesungguhnya keropos”*.

Yang lainnya, biaya operasional ujian nasional di tahun 2018 tidak terbayar, dan baru terbayar di tahun 2019. Biaya operasional digunakan untuk kegiatan rutin sebelum ujian nasional di tahun berikut.

Tahun 2009-2011 pernah dilakukan kerja sama antara Dinas Pendidikan dengan FKIP Uncen untuk kegiatan PPKHB/Portofolio, tapi melalui diskusi internal pimpinan PPKHB/Portofolio, kegiatan tersebut batal direalisasikan karena pembiayaan yang besar sehingga dialihkan ke kegiatan kelas daerah. Kebijakan Bappeda Biak dalam meningkatkan pendidikan di Biak adalah: meningkatkan sumber daya manusia yang unggul. Program yang dibangun adalah meningkatkan sumber daya manusia, pembangunan gedung fisik, menyiapkan sarana dan gedung, meningkatkan tenaga pendidik, peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun tantangan yang dihadapi adalah sebaran sarana pendidikan tidak merata. Sekolah tidak merata karena distribusi penduduk yang juga tidak merata. Penduduk cenderung mengelompok sesuai asal usul daerah/marga, disamping potensi sumber daya alam yang tidak memadai. Ada beberapa lokasi hunian penduduk yang kesulitan air bersih dan tidak mempunyai hutan yang layak untuk ditanami tanaman jangka panjang. Hal inilah yang menyulitkan permukiman yang terkonsentrasi.

Alhasil angka usia sekolah di setiap kampung tidak merata atau sedikit, sementara kebutuhan akan pendirian sekolah harus dipenuhi. Kualifikasi guru yang masih rendah karena terbatasnya peluang untuk guru melanjutkan pendidikan dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga berpengaruh terhadap peluang mengikuti sertifikasi. Belum lagi rendahnya sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan. **Mau tak mau, peningkatan kompetensi guru tak terelakkan.** Rata-rata orang tua mendukung pendidikan.

Perekrutan guru harus menjadi prioritas. Sebaran guru yang tidak merata di TK hingga SD harus dipikirkan upaya pemerataannya. Guru bidang studi eksakta harus dilipatkan jumlahnya. Untuk meminimalisir waktu dan jarak siswa ke sekolah, pemerintah Kabupaten Biak-Numfor perlu menyediakan bus sekolah bagi anak-anak sekolah untuk mengantar-jemput. Terutama anak-anak sekolah yang tinggal di daerah-daerah yang jarang tersedia angkutan umum pada waktu pergi pulang siswa, sebagaimana yang diterapkan di daerah perkotaan.

Secara umum sarana yang mendukung pendidikan masih kurang. Menurut salah satu staf Bappeda Biak Numfor pada sebuah diskusi yang dilakukan Oktober 2019, pendidikan di daerah ini lebih menitikberatkan sarana fisik. Jumlah sekolah dasar banyak dibangun, namun terjadi kekurangan guru. Ada masalah dalam mobilisasi siswa. Seringkali data dapodik di sekolah tidak dilaporkan ke Bappeda. Padahal data bersangkutan penting bagi Bappeda sebagai bahan analisis dalam pengambilan keputusan. Staf-staf di dinas tidak melaporkan data jumlah siswa dan guru ke Bappeda. Pembiayaan pendidikan di Biak Numfor berasal dari dana alokasi khusus untuk pembangunan fisik, termasuk membayar hak guru.

Menurut analisis kebutuhan pendidikan yang dilakukan Bappeda Biak, perekrutan tenaga guru diperlukan. Kemampuan anak-anak di bidang eksakta masih sangat kurang. Masyarakat

Biak pada umumnya mengajukan usulan pembangunan gedung sekolah (untuk jenjang yang diinginkan) langsung ke Bupati tanpa memperhitungkan jumlah penduduk, sebaran dan jumlah guru. Ketersediaan guru dan bus sekolah belum terealisasi. Para kepala kampung sebenarnya bisa menyiapkan bus sekolah di wilayahnya dari dana desa yang dikelolanya.

Gagasan pendidikan berpola asrama barangkali bisa dipertimbangkan. Gagasan ini terasa perlu untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Bila pemerintah daerah mendukung pendidikan berpola asrama, maka pendidikan dasar (kelas 1 hingga kelas 3) cukup disediakan di kampung untuk anak didik belajar calistung. Sekolah Dasar yang dibangun cukup memiliki 3 ruang kelas untuk pendidikan dasar kelas rendah. Bila anak didik di kelas rendah sekolah dasar di sebuah distrik menyelesaikan pendidikan hingga di kelas 3, pendidikan selanjutnya di kelas 4 hingga 6 dipusatkan di ibu kota Distrik bersama siswa lain dari sekolah lain yang telah naik kelas 3 sekolah dasar. Pusat pendidikan untuk siswa kelas 3 SD yang pindah ke kelas 4 ditampung seluruhnya di beberapa sekolah/ruang kelas yang dibangun di ibu kota distrik. Anak-anak tinggal di asrama dan melanjutkan kelasnya. Anak-anak tersebut dapat pulang ke rumahnya pada setiap Sabtu. Minggu sore kembali ke tempat penampungan di ibu kota distrik.

Gagasan ini, jika dilakukan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, berpeluang meningkatkan angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah akan naik dan tentu berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hal itu mungkin akan tampak 10 tahun kemudian. Bahwa peluang anak putus sekolah di SD dan SMP yang telah melewati wajib belajar 9 tahun di sekolah berpola asrama dapat ditekan.

Semua potensi dikembangkan sesuai data per wilayah dan kebutuhan. SMP Negeri Yenburwo, Distrik Numfor Timur, misalnya, memiliki asrama untuk menampung siswa-siswi di kampung-kampung sekitar. Pembangunan asrama di Distrik di Numfor Timur penting mengingat kampung asal siswa relatif jauh (kurang lebih 30 km). Pada setiap Sabtu siswa pulang ke kampung halaman. Pada Minggu sore kembali ke Yenburwo dengan alat transportasi yang jarang dimanfaatkan secara merata oleh setiap siswa.

Tentu tidak semua membutuhkan asrama. Sebab adanya asrama menuntut perhatian dan tanggung jawab sekolah dan orang tua. Kehadiran asrama dengan sendirinya mempersyaratkan kebutuhan hidup penghuninya berupa makan-minum dan pengawasan. Tidak bisa pihak sekolah dan orang tua melepaskan tangan begitu saja.

Rata-rata dana kampung untuk tiap kampung di Kabupaten Biak Numfor 700 juta setahun. Andaikata kepala kampung menyumbangkan ke Dinas Pendidikan/pihak sekolah 5-10 persen dari dana kampung untuk kebutuhan hidup berasrama, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, hal itu tidak mustahil dapat dilakukan. Termasuk pembuatan mebelair dan pengadaan perangkat komputer untuk praktek. Kerja sama bisa dilakukan antara Bappeda, BMPK dan Bupati.

Pendidikan dan kesehatan merupakan basis potensi yang harus dikembangkan Pemerintah Kabupaten Biak-Numfor, Bappeda Biak bertugas mengatur distribusi guru yang tidak sesuai berdasarkan potensi. OPD terkait harus berikan data berkaitan dengan angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar dan rata-rata lama sekolah.

Partisipasi masyarakat lewat kepala kampung, tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam hal membangun pendidikan di Biak sangat diperlukan. Sistem informasi pembangunan daerah harus sejalan dengan program provinsi. Dokumen *grand design* harus sesuai dengan program RPJMD dan harus dibuat dalam aplikasi/planning untuk distrik/kampung. Diharapkan pula intervensi dari kampung, provinsi, Bappeda kota, pusat hingga desa/kampung. Pihak-pihak ini harus mengatur pembagian dana program untuk kerja di lapangan.

Dokumen temuan yang dibuat memerlukan dukungan masyarakat sebagai prasyarat penentu keberhasilan program; sebagai lisensi pendidikan yang paling mendasar. Ke depan perlu ada disain yang terintegrasi demi keberhasilan terkait: dokumen pemerintah provinsi, ujian nasional dengan dana Otsus, alokasi dana Otsus, *grand design*.

Karena kurang koordinasi antara masyarakat, guru dan pemerintah, honor untuk para guru kontrak (honoror) tersendat pembayarannya. Untuk guru-guru Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), misalnya, 4% setoran dari setiap jemaat saja tidak ada. **Intervensi YPK Papua ke sekolah-sekolah yayasan di Biak, sama sekali tidak ada.**

Di SD YPK Mandori, misalnya, tidak dialokasikan dana kampung untuk membayar guru. Dana kampung itu: Rp 600 juta x 257 kampung per tahun (sama dengan 700 juta tiap tahun. Penting untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desa memahami aturan keuangan pengelolaan dana kampung. Bappeda tidak mengurus dana kampung, dana tersebut disalurkan dari pusat lewat KPPN, lalu diteruskan ke BPMK yang mentransfernya ke setiap rekening kampung. Inspektorat Biak pada umumnya tidak kerjasama dengan BPMK.

Berbagai faktor yang mempengaruhi Pendidikan dasar di Indonesia yang berkaitan dengan penentu dari mutu Pendidikan, antara lain yaitu: 1) Faktor tenaga kependidikan, 2) Faktor buku pelajaran, 3) Faktor proses pendidikan, 4) Faktor efektifitas dan efisien (Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi, 2017

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap data primer dan sekunder yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada kekurangan guru. Ada sarana dan prasarana pendidikan, terutama gedung sekolah yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Lalu, penempatan guru yang tidak merata, kurangnya peningkatan kapasitas guru di setiap jenjang pendidikan dalam hal pelatihan, dan tunjangan profesi. Hal ini disebabkan minimnya pengawasan, selain dukungan masyarakat. Faktor-faktor ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sekolah dari sisi manajemen berbasis sekolah.

Untuk itu pemerintah daerah setempat mengubah strategi pengembangan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor dengan melakukan berbagai kajian untuk mencari akar persoalan lemahnya penanganan pendidikan di Kabupaten ini dengan melibatkan akademisi untuk melakukan rancangan induk/grand design yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Prihatin Disas, (2020), Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru. Jurnal: Universitas Pendidikan Indonesia. Malang.
- Elih Yuliah, (2020), Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal Pengawas Sekolah di Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Jawa Barat.
- Ivan, dkk (2015), Cakrawala Pendidikan. Jurnal, Februari 2015, Tahun XXXIV, No.1
- Jurnal Neraca, (2017), Jurnal Neraca, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi, Volume Neraca Vol. 1 No. 1 Juni 2017.
- Majalah BaKTINews, Pendidikan Harmoni: Konflik Berujung Harmoni, September-Oktober 2012.
- Mokhammad Ishaq Tholani, (2013), Problematika Pendidikan di Indonesia. Jurnal: PKn STKIP Muhammadiyah Sorong.
- Rustina,(2007) M.P, Pembangunan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Pendidikan, Penerbit:
- Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, (2016), Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu. Penerbit:
- Umi Arifah, (2018), Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan. Jurnal: Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen, 2018.
- Suyahman, (2016), Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas Dalam Kaitannya Dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6. Nomor 2, November 2016.
- Widya Sari, dkk (2020), Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19. Jurnal: Institut Agama Islam Negeri Bone. Makassar.
- Very Y. Londa, Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Daerah Kepulauan (Studi di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Utara). Jurnal Universitas Sam Ratulangi.
- Yanuarto, Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan